KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

75G1ZB0G

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 9 8 8			H.4 X Final			
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatalar	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 596 9 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RIANDY							
P. DDL DASAL 24 VANC DIDOTONS							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01	7.310.000	7.310.000	0	5	365.500		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	162722	0 0 0				
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal :	0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY						
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya		
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							